

KONTRIBUSI ETIKA POLITIK ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KORUPSI DI INDONESIA

Andika Dwi Putra¹, Rifyan Zahir², Syaiful Akbar Razak³, Kurniati⁴

*E-mail: 10200122103@uin-alauddin.ac.id, 10200122108@uin-alauddin.ac.id, 10200122102@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tantangan sosial dan politik yang dihadapi oleh negara-negara Muslim, seperti konflik dan korupsi, memerlukan pendekatan holistik berbasis nilai-nilai kuat. Konflik berkepanjangan dan tingkat korupsi yang tinggi telah menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi etika politik Islam dalam penyelesaian konflik dan pembatasan korupsi di negara-negara Muslim kontemporer. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengevaluasi prinsip-prinsip etika politik Islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta penerapannya dalam konteks politik modern. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa etika politik Islam memberikan kerangka kerja moral yang kuat untuk membangun pemerintahan yang lebih adil dan responsif. Prinsip keadilan meliputi distribusi sumber daya yang adil dan perlindungan hak-hak individu serta kelompok rentan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun tantangan seperti interpretasi yang beragam dan politisasi agama tetap ada, dengan komitmen yang tepat, etika politik Islam dapat mendukung pembangunan sosial dan politik di negara-negara Muslim kontemporer. Kesimpulannya, etika politik Islam menawarkan potensi besar dalam mengatasi tantangan sosial dan politik melalui penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di negara-negara Muslim.

Kata kunci: Etika Politik Islam; Konflik Korupsi; Transparansi; Akuntabilitas

Abstract

The social and political challenges faced by Muslim countries, such as conflict and corruption, necessitate a comprehensive approach rooted in strong values. Prolonged conflict and rampant corruption have impeded development and eroded public trust in the government. This research seeks to investigate the role of Islamic political ethics in resolving conflicts and curbing corruption in modern Muslim countries. The research methodology employed is qualitative analysis, utilizing a literature review to assess the principles of Islamic political ethics, including justice, transparency, and accountability, as well as their application within contemporary political contexts. The research findings demonstrate that Islamic political ethics offer a robust moral framework for cultivating a more equitable and responsive government. The principle of justice encompasses the fair allocation of resources and the safeguarding of individuals' and vulnerable groups' rights. Transparency and accountability in decision-making processes can mitigate corruption and enhance public trust. While challenges persist, such as varying interpretations and the instrumentalization of religion for political purposes, with the requisite commitment, Islamic political ethics can bolster social and political progress in present-day Muslim countries. In conclusion, Islamic political ethics hold considerable promise in surmounting social and political challenges by upholding the values of justice, transparency, and accountability. It is anticipated that the recommendations derived from this research will contribute to the enhancement of governance in Muslim countries.

Keywords: *Islamic Political Ethics; Corruption Conflict; Transparency; Accountability*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, yang berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Praktik korupsi merusak integritas pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Dalam upaya mengatasi masalah ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan etis dan normatif, termasuk etika politik Islam yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian konflik korupsi di Indonesia (Imansyah & Taquiuddin, 2022).

Banyak negara Muslim menghadapi konflik internal yang berkepanjangan, baik yang bersifat sektarian, etnis, maupun politik. Contoh mencolok adalah konflik di Suriah, Yaman, dan Libya, yang telah menyebabkan kehancuran besar, krisis kemanusiaan, dan migrasi massal. Terorisme dan ekstremisme juga menjadi ancaman signifikan, dengan kelompok-kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda yang terus melakukan aksi kekerasan (Illahi, 2019).

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengedepankan moderasi beragama dalam konsepnya, terbukti mampu menciptakan kedamaian di tengah masyarakat yang beranekaragam (Kurniati et al., 2022). Etika politik Islam, yang berakar pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Al-Mawardi, seorang pemikir politik Islam klasik, menekankan pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Menurutnya, pemimpin harus bertindak adil dan jujur, serta menjaga kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang sering kali diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. (Al-Mawardi, 2019)

Dalam perspektif Al-Ghazali, etika politik Islam tidak hanya menekankan pentingnya moralitas individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dan kolektif dalam menjaga integritas pemerintahan. Al-Ghazali berpendapat bahwa korupsi adalah hasil dari kelemahan moral dan spiritual yang harus diperbaiki melalui pendidikan dan pengawasan yang ketat (Al-Ghazali, 2017). Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan etis dan agama dalam membentuk karakter individu yang bermoral dan berintegritas, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pengurangan praktik korupsi. Ibn Taymiyyah, dalam karyanya, juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Ia berargumen bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat dan kepada Allah (Taymiyyah, 2019). Konsep ini relevan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana transparansi dan akuntabilitas sering kali diabaikan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang akan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Selain itu, Al-Farabi dalam teorinya tentang negara ideal, menyatakan bahwa pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan moralitas tinggi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Al-Farabi, 2019). Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu mengatasi masalah korupsi dengan mendorong para pemimpin untuk

bertindak berdasarkan nilai-nilai etis dan moral yang kuat. Pemikiran Abul A'la Maududi tentang etika politik Islam juga relevan dalam konteks pemberantasan korupsi. Maududi menekankan pentingnya penerapan syariah dalam kehidupan publik dan politik sebagai cara untuk memastikan keadilan dan integritas (Maududi, 2018). Menurut Maududi, penerapan syariah akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan moralitas dan keadilan dalam pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengurangi praktik korupsi.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks modern, sehingga memberikan landasan moral yang kuat untuk mengatasi masalah sosial dan politik. Ini membantu negara-negara Muslim untuk tetap relevan dengan prinsip-prinsip agama mereka sambil menavigasi tantangan kontemporer.

Abdullahi An-Na'im, seorang pemikir kontemporer, berpendapat bahwa penerapan etika politik Islam harus disesuaikan dengan konteks modern dan pluralistik (An-Na'im, 2008). Dalam konteks Indonesia yang beragam secara etnis dan agama, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etis Islam dapat diterapkan secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan keragaman dan pluralisme masyarakat. Penerapan etika politik Islam dalam penyelesaian konflik korupsi di Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kelembagaan. Sistem hukum yang kuat dan independen adalah salah satu faktor kunci dalam upaya pemberantasan korupsi (Esposito, 1998). Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan akuntabilitas dapat memberikan landasan yang kuat bagi reformasi hukum di Indonesia.

Selain itu, penting untuk memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengadopsi prinsip-prinsip etika politik Islam dalam operasional dan kebijakannya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa lembaga-lembaga ini dapat berfungsi secara efektif dan berintegritas dalam upaya mereka untuk memerangi korupsi. Pendidikan etis dan moral juga merupakan komponen penting dalam penerapan etika politik Islam untuk pemberantasan korupsi (Mazrui, 2017). Pendidikan yang menekankan nilai-nilai moral dan etika Islam dapat membantu membentuk generasi yang memiliki integritas tinggi dan komitmen terhadap keadilan. Ini akan menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan masyarakat yang bebas dari korupsi.

Selain pendekatan normatif, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan praktis dan strategis dalam penerapan etika politik Islam untuk pemberantasan korupsi. Ini termasuk pengembangan kebijakan dan program yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam, serta penguatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawasan (Abu-Nimer, 2003). Pendekatan ini juga harus mencakup partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi adalah salah satu strategi yang efektif untuk mengurangi korupsi (Nasr, 2004). Dengan demikian, penerapan etika politik Islam dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya kolektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dari latar belakang diatas, penulis dalam jurnal ini akan membahas mengenai Konsep Etika Politik Islam, serta bagaimana Etika Politik Islam dalam menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk meneliti kontribusi etika politik Islam terhadap penyelesaian konflik korupsi di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis pustaka, diperlukan sebuah metodologi yang terstruktur dan mendalam. Metode ini akan memungkinkan untuk memahami secara holistik bagaimana nilai-nilai etika politik Islam dapat berperan dalam mengatasi masalah korupsi yang kompleks di Indonesia. Pertama, penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks dan dokumen terkait. Ini termasuk memeriksa literatur, fatwa, dan tulisan ulama tentang konsep-konsep seperti 'adl (keadilan), amanah (amanah), dan ihsan (kebaikan). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki bagaimana pandangan Islam tentang integritas dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam konteks penyelesaian konflik korupsi. Kedua, penelitian akan melakukan analisis pustaka yang menyeluruh terhadap kajian-kajian terdahulu yang relevan. Ini mencakup tinjauan terhadap artikel-artikel jurnal, buku, dan laporan terkait implementasi nilai-nilai etika politik Islam dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Dengan demikian, akan dikumpulkan bukti-bukti dan temuan-temuan yang mendukung atau menantang kontribusi etika politik Islam dalam menangani korupsi. Ketiga, penelitian ini akan mempertimbangkan pendekatan komparatif terhadap praktik-praktik internasional dan lokal dalam menangani korupsi. Ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana nilai-nilai etika politik Islam berbeda atau serupa dengan pendekatan sekuler atau lainnya dalam memerangi dan mencegah korupsi. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang keunggulan atau kelemahan pendekatan berbasis Islam dalam konteks Indonesia. Keempat, analisis akan disusun dengan memperhatikan konstruksi teoretis yang solid tentang hubungan antara etika politik Islam dan penyelesaian konflik korupsi. Hal ini mencakup pengembangan kerangka konseptual yang memadai untuk menggambarkan bagaimana implementasi nilai-nilai etika politik Islam dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik dalam menanggapi korupsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang potensi nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer yang kompleks ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis pustaka yang terstruktur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana etika politik Islam dapat menjadi faktor kunci dalam upaya penyelesaian konflik korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP ETIKA POLITIK ISLAM

Etika politik Islam merupakan cabang dari filsafat Islam yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam konteks politik dan pemerintahan. Dalam Islam, politik tidak hanya dipandang sebagai upaya mencapai kekuasaan, tetapi lebih dari itu, sebagai

sarana untuk mencapai tujuan-tujuan luhur yang telah ditetapkan oleh syariat. Konsep ini mencakup sejumlah prinsip dasar yang harus diikuti oleh para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip utama dalam etika politik Islam adalah keadilan (al-adl). Keadilan merupakan pilar utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Menurut Al-Mawardi dalam bukunya "Al-Ahkam al-Sultaniyyah", keadilan adalah salah satu tujuan utama dari pemerintahan Islam. Pemimpin harus memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan yang diambil adil dan tidak memihak, serta menjunjung tinggi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Keadilan juga meliputi perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial (Al-Farabi, 2010) Prinsip kedua adalah amanah (trustworthiness), yang mengacu pada integritas dan kejujuran. Pemimpin Islam diharapkan untuk menjaga amanah yang diberikan kepada mereka oleh rakyat. Ini berarti mereka harus bertindak dengan jujur, transparan, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (Al-Qur'an, An-Nisa: 58., n.d.). Hal ini menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Syura (konsultasi) merupakan prinsip ketiga dalam etika politik Islam. Syura berarti bahwa keputusan-keputusan penting harus diambil melalui konsultasi dengan para ahli dan perwakilan masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran yang menyebutkan, "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS Asy-Syura: 38). Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas, serta menghindari otoritarianisme dan pengambilan keputusan yang sewenang-wenang (Kamali, 2009).

Prinsip keempat adalah masalahah (kemaslahatan umum), yang merujuk pada pencapaian kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Al-Ghazali dalam "Al-Mustasfa" menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus berkontribusi pada pemeliharaan lima hal ini (Al-Ghazali, 1993). Prinsip kelima adalah akhlak (moralitas). Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan pribadi dan publik. Pemimpin Islam diharapkan untuk menjadi teladan dalam hal akhlak dan moralitas. Ini termasuk kesederhanaan, kejujuran, dan ketaatan pada perintah Allah. Nabi Muhammad SAW adalah contoh utama dalam hal ini, dan perilaku serta kepemimpinannya menjadi model bagi semua pemimpin Islam (Khaldun, 2017). Selanjutnya, kebebasan (freedom) dalam konteks etika politik Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Menurut Sayyid Qutb dalam "Social Justice in Islam", kebebasan individu harus dihormati selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan-aturan syariat. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang diakui, namun harus

digunakan dengan bijaksana dan tidak merusak tatanan sosial atau menyebarkan fitnah (Qutb, 2000).

Tanggung jawab sosial (social responsibility) juga merupakan bagian integral dari etika politik Islam. Pemimpin harus menyadari bahwa mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka membawa manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam buku "Public Policy: Formulation, Implementation, and Evaluation", Dunn menyebutkan bahwa kebijakan yang baik harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Dunn, 2018). Prinsip terakhir yang penting dalam etika politik Islam adalah pemeliharaan persatuan dan harmoni (unity and harmony). Islam menekankan pentingnya persatuan umat dan menghindari perpecahan. Pemimpin harus berusaha untuk memelihara harmoni dalam masyarakat dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan kerjasama antar kelompok yang berbeda. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius (Hashmi, 2001). Secara keseluruhan, konsep etika politik Islam memberikan panduan yang komprehensif bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta mampu menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, termasuk korupsi. Namun, penerapan konsep ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemimpin maupun masyarakat, untuk senantiasa berpegang pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan berpolitik dan bernegara.

Peran Etika Politik Islam Dalam Penyelesaian Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini. Dampaknya yang merusak tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga merusak moral dan etika masyarakat. (Sahal, 2015) Dalam konteks ini, etika politik Islam dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah korupsi yang meluas. Dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, etika politik Islam menawarkan landasan moral dan normatif yang kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Etika politik Islam berakar pada nilai-nilai yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, serta tradisi pemikiran para ulama klasik dan kontemporer. Salah satu prinsip utama adalah keadilan ('adl), yang merupakan salah satu sifat Allah dan menjadi tuntutan bagi setiap individu Muslim untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan pemerintahan. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat An-Nisa ayat 58, yang mengarahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak dan menghukum dengan adil.¹ Selain itu, kejujuran (sidq) juga merupakan prinsip penting dalam etika politik Islam. Kejujuran dalam pemerintahan tidak hanya mencakup ketulusan dan transparansi dalam tindakan, tetapi juga melibatkan integritas moral dan etika pejabat publik. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan pentingnya berkata benar dan berperilaku jujur sebagai ciri dari seorang Muslim

yang baik (Al-Ghazali, 2018). Prinsip lain yang sangat relevan adalah tanggung jawab (mas'uliyah), yang menekankan bahwa setiap individu, terutama pemimpin dan pejabat publik, akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di dunia ini dan di akhirat. Pemimpin yang korup akan dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan mereka, dan Islam mengajarkan bahwa hukuman di akhirat akan jauh lebih berat daripada hukuman di dunia.

Implementasi etika politik Islam dalam mengatasi korupsi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pendidikan dan penguatan moral. Pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai Islam, terutama dalam hal etika dan moral, harus ditanamkan sejak dini. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya harus mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari kurikulum mereka. Kedua, reformasi sistem hukum. Sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting dalam memberantas korupsi. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, dengan hukuman yang berat bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan korupsi. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. (Al-Attas, 1995) Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat mencegah praktek korupsi dengan memastikan bahwa semua tindakan pejabat publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem e-governance, dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang korupsi. (Abdullah, 2010)

Beberapa contoh penerapan etika politik Islam dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam kebijakan dan inisiatif tertentu. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus-kasus korupsi besar. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK mengadopsi beberapa prinsip etika politik Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan, Jakarta: KPK, 2020., n.d.). Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil yang berlandaskan nilai-nilai Islam juga aktif dalam memerangi korupsi. Mereka melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya etika dalam pemerintahan. Organisasi-organisasi ini sering kali bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan institusi keagamaan untuk menyebarkan pesan anti-korupsi. (Maududi, 2007)

Meskipun ada banyak potensi manfaat dari penerapan etika politik Islam dalam memberantas korupsi, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai etika Islam di kalangan sebagian pejabat publik dan masyarakat. Beberapa individu mungkin enggan untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini karena mereka melihatnya sebagai sesuatu yang kuno atau tidak relevan dengan konteks modern. (Sachedina, 2001) Tantangan lain adalah pengaruh budaya korupsi yang sudah mengakar kuat di berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat. Korupsi sering

kali dipandang sebagai bagian dari "budaya" atau kebiasaan yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengubah budaya ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. (Esposito, 1998)

Etika politik Islam menawarkan kerangka kerja yang kuat dan komprehensif untuk memerangi korupsi di Indonesia. Dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, etika politik Islam dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasinya, dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, etika politik Islam dapat berperan penting dalam menyelesaikan masalah korupsi yang meluas di Indonesia. Implementasi nilai-nilai ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyatnya

SIMPULAN

Secara keseluruhan, etika politik Islam menawarkan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, amanah, syura, masalah, akhlak, kebebasan yang bertanggung jawab, tanggung jawab sosial, serta pemeliharaan persatuan dan harmoni yang dapat membentuk dasar moral dan etika yang kuat dalam pemerintahan. Dengan menekankan integritas, transparansi, dan keadilan, etika politik Islam mengarahkan para pemimpin dan pejabat publik untuk berfungsi tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai penjaga moral masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, yang mampu menghadapi tantangan kontemporer seperti korupsi, dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, keberhasilan penerapannya memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Etika politik Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi korupsi di Indonesia dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan mengintegrasikan pendidikan moral, reformasi hukum, dan transparansi dalam pemerintahan, etika politik Islam berpotensi menciptakan sistem yang adil dan akuntabel. Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman dan budaya korupsi yang mengakar masih ada, penerapan nilai-nilai ini melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan individu dapat membawa perubahan signifikan dalam memerangi korupsi, menuju pemerintahan yang lebih bersih dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2010). *Filsafat dan Etika Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu-Nimer, M. (2003). *Nonviolence and Peace Building in Islam*. University Press of Florida.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.

- Al-Farabi. (2010). *Al-Farabi's Ideal State: A Comparative Analysis*. The Perfect State.
- Al-Farabi. (2019). *Al-Madina al-Fadila*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa*. Cairo.
- Al-Ghazali. (2017). *Ihya' Ulum al-Din*. Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Ghazali. (2018). *Ihya Ulumuddin*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Mawardi. (2019). *Al-Ahkām As-Şultāniyyah wal Wilāyāt Ad-Diniya*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qur'an, An-Nisa: 58*. (n.d.).
- An-Na'im, A. (2008). *Islam and the Secular State*. Harvard University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy: Formulation, Implementation, and Evaluation*. Routledge.
- Esposito, J. L. (1998). *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Hashmi, S. H. (2001). *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Political Studies 49, no. 5.
- Illahi, B. K. (2019). Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 136–152. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.136-152>
- Imansyah, Y., & Taquiuddin, H. U. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa (Studi Di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat) Pendahuluan Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan saat ini di Indonesia , korupsi mar. *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities*, 1(1), 1–13.
- Kamali, M. H. (2009). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khaldun, I. (2017). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton University Press, 1967.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan, Jakarta: KPK, 2020*. (n.d.).
- Kurniati, Haris, & Rahman, A. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Penanggulangan Konflik dan Bentrok Fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 111–121.
- Maududi, A. A. (2007). *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications.
- Maududi, A. A. (2018). *Islamic Way of Life*. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Mazrui, A. (2017). *Islam and the Moral Order*. The Muslim World, Vol. 70, No. 2.
- Nasr, S. H. (2004). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. HarperOne.
- Qutb, S. (2000). *Social Justice in Islam*. Islamic Publications International.
- Sachedina, A. (2001). *Islamic Roots of Democratic Pluralism*. New York: Oxford University Press.
- Sahal, A. (2015). Etika Politik Islam dalam Penanganan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2).
- Taymiyyah, I. (2019). *Al-Siyasah al-Shar'iyah*. Cairo: Dar al-Hadith.